



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Badan Keuangan dan Aset Daerah

**RENCANA AKSI KINERJA
TAHUN 2025**

**RENCANA AKSI
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BKAD) KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025**

No	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SASARAN				PROGRAM	KEGIATAN	KEGIATAN								KETERANGAN				
			TARGET						SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		TARGET AKHIR	CAPAIAN AKHIR
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4						TARGET	REALISASI CAPAIAN	TARGET	REALISASI CAPAIAN	TARGET	REALISASI CAPAIAN	TARGET	REALISASI CAPAIAN		
1	Ketepatan waktu penyusunan Dokumen Perencanaan, penganggaran, dan penatausahaan keuangan daerah	Ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan RAPBD-P				100%	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	2 dokumen			2 dokumen (1 dokumen KUA dan 1 dokumen PPAS APBD)					2 dokumen (1 dokumen KUA dan 1 dokumen PPAS APBD)		
									Koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS	Jumlah dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disusun	2 dokumen			2 dokumen (1 dokumen KUA dan 1 dokumen PPAS perubahan APBD)					2 dokumen (1 dokumen KUA dan 1 dokumen PPAS perubahan APBD)		
									Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD	Jumlah peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD	2 Dokumen						2 dokumen (1 dokumen perda APBD dan 1 dokumen perwal penjabaran APBD)		2 dokumen (1 dokumen perda APBD dan 1 dokumen perwal penjabaran APBD)		
									Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	Jumlah peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen			2 dokumen (1 dokumen perda Perubahan APBD dan 1 dokumen perwal penjabaran Perubahan APBD)					2 dokumen (1 dokumen perda Perubahan APBD dan 1 dokumen perwal penjabaran Perubahan APBD)		
									Koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran	Jumlah dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran	2 Dokumen			1 dokumen pedoman pelaksanaan APBD Kota Bandar Lampung			1 dokumen pedoman pelaksanaan APBD Kota Bandar Lampung		2 dokumen pedoman pelaksanaan APBD Kota Bandar Lampung		
									Koordinasi perencanaan anggaran pendapatan	Jumlah dokumen hasil Koordinasi perencanaan anggaran pendapatan	3 dokumen			1 Dokumen koordinasi perencanaan anggaran Pendapatan	1 Dokumen koordinasi perencanaan anggaran Pendapatan	1 Dokumen koordinasi perencanaan anggaran Pendapatan			3 Dokumen koordinasi perencanaan anggaran Pendapatan		
									Koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah	Jumlah dokumen hasil Koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah	3 dokumen			1 Dokumen koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah	1 Dokumen koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah	1 Dokumen koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah			3 Dokumen koordinasi perencanaan anggaran Belanja Daerah		
		Ketepatan waktu penyelesaian SPZD yang dinyatakan lengkap dan sah secara ketentuan				100%	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi dan pengelolaan kas daerah	Koordinasi dan pengelolaan kas daerah	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan pengelolaan kas daerah	12 dokumen	3 Dokumen hasil koordinasi dan pengelolaan kas daerah	3 Dokumen hasil koordinasi dan pengelolaan kas daerah	3 Dokumen hasil koordinasi dan pengelolaan kas daerah	3 Dokumen hasil koordinasi dan pengelolaan kas daerah	3 Dokumen hasil koordinasi dan pengelolaan kas daerah			12 Dokumen hasil koordinasi dan pengelolaan kas daerah		
								Penyajian, pelaksanaan, pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	Penyajian, pelaksanaan, pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	3 dokumen						3 dokumen (1 dokumen laporan SPD, 1 dokumen laporan anggaran kas APBD dan 1 dokumen laporan anggaran perubahan APBD-P pemerintah Kota Bandar Lampung)		3 dokumen (1 dokumen laporan SPD, 1 dokumen laporan anggaran kas APBD dan 1 dokumen laporan anggaran perubahan APBD-P pemerintah Kota Bandar Lampung)		

2	Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah	Ketepatan waktu penyusunan LKPD yang sesuai SAP dan peraturan yang berlaku			100%		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran	14 laporan	3 (tiga) laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran	4 (tiga) laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran	3 (tiga) laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran	4 (tiga) laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran	14 (empat belas) laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran
3	Opini Wajar Tanpa Pengecualian BPK	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP				Konsolidasi laporan keuangan SKPD,BLUD, dan laporan keuangan pemerintah daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD,BLUD, dan laporan keuangan pemerintah daerah yang terkonsolidasi	1 laporan					1 (satu) dokumen laporan keuangan SKPD, laporan keuangan BLUD, dan laporan keuangan pemerintah daerah)	1 (satu) dokumen laporan keuangan SKPD, laporan keuangan BLUD, dan laporan keuangan pemerintah daerah)
							Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/kota	Jumlah rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/kota	5 dokumen			2 (dua) dokumen rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi		3 (tiga) dokumen rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/kota	5 (lima) dokumen rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/kota
							Koordinasi, sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	1 dokumen					1 (satu) dokumen hasil Koordinasi, sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	1 (satu) dokumen hasil Koordinasi, sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah
							Pembinaan akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pemerintah kab/kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pemerintah kab/kota	162 orang			81 (delapan puluh satu) orang yang mengikuti pembinaan akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pemerintah kab/kota		81 (delapan puluh satu) orang yang mengikuti pembinaan akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pemerintah kab/kota	Jumlah 162 (seratus enam puluh dua) orang yang mengikuti pembinaan akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pemerintah kab/kota
							Pembinaan pengelolaan keuangan BLUD Kab/kota	Jumlah BLUD Kab/Kota yang dibina	32 lembaga					32 lembaga BLUD Kab/Kota yang dibina	32 lembaga BLUD Kab/Kota yang dibina
						Penujng Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis perencanaan dan pelaksanaan penerimaan pinjaman pemerintah daerah	Jumlah laporan hasil Analisis perencanaan dan pelaksanaan penerimaan pinjaman pemerintah daerah	1 laporan					1 (satu) laporan administrasi pelaksanaan penatausahaan pinjaman daerah kota Bandar Lampung	1 (satu) laporan administrasi pelaksanaan penatausahaan pinjaman daerah kota Bandar Lampung
							Analisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman pemerintah daerah	Jumlah laporan hasil Analisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman pemerintah daerah	6 laporan	1 (satu) laporan hasil Analisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman pemerintah daerah	1 (satu) laporan hasil Analisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman pemerintah daerah	2 (dua) laporan hasil Analisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman pemerintah daerah	2 (dua) laporan hasil Analisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman pemerintah daerah	2 (dua) laporan hasil Analisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman pemerintah daerah	2 (dua) laporan hasil Analisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman pemerintah daerah

								Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	Jumlah laporan hasil Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	12 laporan	3 (tiga) laporan hasil Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan		3 (tiga) laporan hasil Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	3 (tiga) laporan hasil Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	12 (dua belas) laporan hasil Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	
								Pengelolaan dana darurat dan mendesak	Jumlah laporan hasil Pengelolaan dana darurat dan mendesak	12 laporan	3 (tiga) laporan hasil Pengelolaan dana darurat dan mendesak		3 (tiga) laporan hasil Pengelolaan dana darurat dan mendesak	3 (tiga) laporan hasil Pengelolaan dana darurat dan mendesak	12 (dua belas) laporan hasil Pengelolaan dana darurat dan mendesak	
							Pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah	inventarisasi dan analisis data bidang keuangan daerah	Jumlah dokumen hasil inventarisasi dan analisis data bidang keuangan daerah	4 Dokumen	1 (satu) dokumen hasil inventarisasi dan analisis data bidang keuangan daerah		1 (satu) dokumen hasil inventarisasi dan analisis data bidang keuangan daerah	1 (satu) dokumen hasil inventarisasi dan analisis data bidang keuangan daerah	4 (empat) dokumen hasil inventarisasi dan analisis data bidang keuangan daerah	UMUM
								Implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah	Jumlah dokumen hasil Implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah	12 dokumen	3 (tiga) dokumen hasil implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah		3 (tiga) dokumen hasil implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah	3 (tiga) dokumen hasil Implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah	12 (dua belas) dokumen hasil Implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah	
								Pembinaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota	30 orang				30 (tiga puluh) orang yang mengikuti Pembinaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota	30 (tiga puluh) orang yang mengikuti Pembinaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota	
2	Tingkat penatausahaan aset daerah sesuai peraturan perundang-undangan	Kesesuaian data total BMD dengan aktiva tetap di neraca pemerintah daerah			100%	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan standar harga	Jumlah standar harga yang disusun	1 dokumen				1 (satu) dokumen standar harga yang disusun	1 (satu) dokumen standar harga yang disusun	
								Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah\ pemeliharaan	Jumlah dokumen RKBMd pengadaan dan RKBMd pemeliharaan	2 dokumen				2 (dua) dokumen RKBMd pengadaan dan RKBMd pemeliharaan	2 (dua) dokumen RKBMd pengadaan dan RKBMd pemeliharaan	
								Penatausahaan barang milik daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan barang milik daerah	1 laporan				1 (satu) Laporan Laporan Penatausahaan barang milik daerah	1 (satu) Laporan Laporan Penatausahaan barang milik daerah	
								Pengamanan barang milik daerah	Jumlah laporan hasil Pengamanan barang milik daerah	1 laporan				1 (satu) Laporan hasil Pengamanan barang milik daerah	1 (satu) laporan hasil Pengamanan barang milik daerah	
								Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 laporan				1 (satu) Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 (satu) Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	

								Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan barang milik daerah	Jumlah dokumen hasil Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah	20 dokumen	5 (lima) dokumen hasil Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah		5 (lima) dokumen hasil Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah	5 (lima) dokumen hasil Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah	5 (lima) dokumen hasil Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah	20 (dua puluh) dokumen hasil Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah
								Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	Jumlah Dokumen hasil rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	2 dokumen					2 (dua) dokumen (1 dokumen mutasi barang daerah, dan 1 dokumen daftar mutasi barang daerah)	2 (dua) dokumen (1 dokumen mutasi barang daerah, dan 1 dokumen daftar mutasi barang daerah)
								Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	1 laporan					1 (satu) Laporan Barang Milik Daerah	1 (satu) Laporan Barang Milik Daerah
3	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Keuangan	Hasil Penilaian akuntabilitas kinerja OPD oleh inspektorat Kota Bandar Lampung (Nilai Sakip OPD)	79,81-79,85			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	1 (satu) dokumen renja		1 (satu) Dokumen Perubahan Renja			2 Dokumen (1 Dokumen Renja dan 1 Dokumen Perubahan Renja)
								Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dokumen					1 (satu) dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 (satu) dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD
								Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen			1 (satu) dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 (satu) dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	
								Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dokumen					1 (satu) dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 (satu) dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD
								Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen					1 (satu) dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	

Bandar Lampung, 2025
KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG,

Dr. MUHAMAD RAM'DHAN, M.Acc., Akt., CGAE., CA
Pembina Tk. I/IV.b
NIP. 197041007 20051 1 006